LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN GONDOMANAN
TAHUN 2019

Disusun oleh:

Kecamatan Gondomanan

LAMPIRAN 1

KECAMATAN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
2019

Executive summary

Tambahkan nggih

Daftar isi.

Commented [PdE1]: Mohon ditambahkan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 dapat tersusun. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era ekonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya Good Governance.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Gondomanan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan disadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Yogyakarta, 30 Januari 2020
Camat Gondomanan

Budi Santosa, SSTP.,M.Si
NIP.19720914 199303 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Gambaran Umum Kecamatan Gondomanan..... 3

1. Kondisi Wilayah 3
2. Struktur Organisasi 6
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 7
4. Isu-isu Strategis Organisasi 9

a. Pelayanan Masyarakat 9

b. Pemberdayaan Masyarakat 11

c. Pembangunan Kewilayahan 12

d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.....12

e. Keterbukaan Informasi Publik 13

5. Keadaan Pegawai 13
6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan 16

D. Sistematika Penyajian 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....17

A. Perencanaan Strategis 2017-2022 17

1. Visi dan Misi 17
2. Tujuan dan Sasaran..... 18
3. Strategi, Program dan Kegiatan 20

B. Perjanjian Kinerja.....22

C. Rencana Anggaran Tahun 2019. 23

1. Target Belanja Kecamatan Gondomanan 23
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
A. Capaian Kinerja Organisasi..... 25
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019..... 25
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.. 29
3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30
a. Sasaran Tingkat perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan Meningkat 30
b. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra 33
c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan 35
4. Realisasi Anggaran 38
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39
a. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 41
B. Realisasi AnggaranTA.2019..... 43
C. Inovasi 44

BAB IV PENUTUP 46
A. Kesimpulan 46
B. Rencana Tindak Lanjut 46

LAMPIRAN.....48

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 4
Tabel I.2 Jumlah RW dan RT Kecamatan Gondomanan 5
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin.....14
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....14
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....15
Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon 15
Tabel II.1 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan.....21
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2019.....22
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.... 23
Tabel II.4 Target Belanja Kecamatan Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2019.....23
Tabel II.5 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis.....24
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan 25
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....26
Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan.....26
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program.....27
Tabel III.5 Data Prosentase Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Tahun 2019.....28
Tabel III.6 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2019 29
Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....30
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 31
Tabel III.9 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....31
Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu 32
Tabel III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....33

Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra 34
Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019 39
Tabel III.14Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 39
Tabel III.15Realisasi Anggaran Kecamatan Gondomanan TA 2019 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gondomanan adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gondomanan secara jelas, transparan dan akuntabel.

2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2019 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gondomanan adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada Tahun 2019.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Gondomanan dalam penerapan azas profesional, transparan dan akuntabel.

C. Gambaran Umum Kecamatan Gondomanan

Kecamatan Gondomanan merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta dengan luas 112.00 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Kepadatan penduduk 13.472 orang/km2. Sebagai daerah perkotaan yang padat dan menjadi subyek pariwisata, sebagian penduduk Kecamatan Gondomanan bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Gondomanan merupakan jantungnya Kota Yogyakarta, pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara dan Titik Nol Kilometer. Gondomanan juga masih memiliki gedung-gedung peninggalan sejarah, sekarang disebut dengan gedung cagar budaya seperti Benteng Vredeburg, Gedung Agung/Istana Negara, Bank Indonesia, Kantor Pos, Bank BNI, Masjid Gedhe Kauman dan Gedung Societet Militer/Taman Budaya.

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta dilintasi oleh Sungai Code, pada ketinggian 113 meter diatas permukaan laut

dengan luas wilayah 1,12 kilometer persegi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kecamatan Ngampilan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakualaman
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kraton
- Sebelah Utara : Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Danurejan

Peta Kecamatan Gondomanan

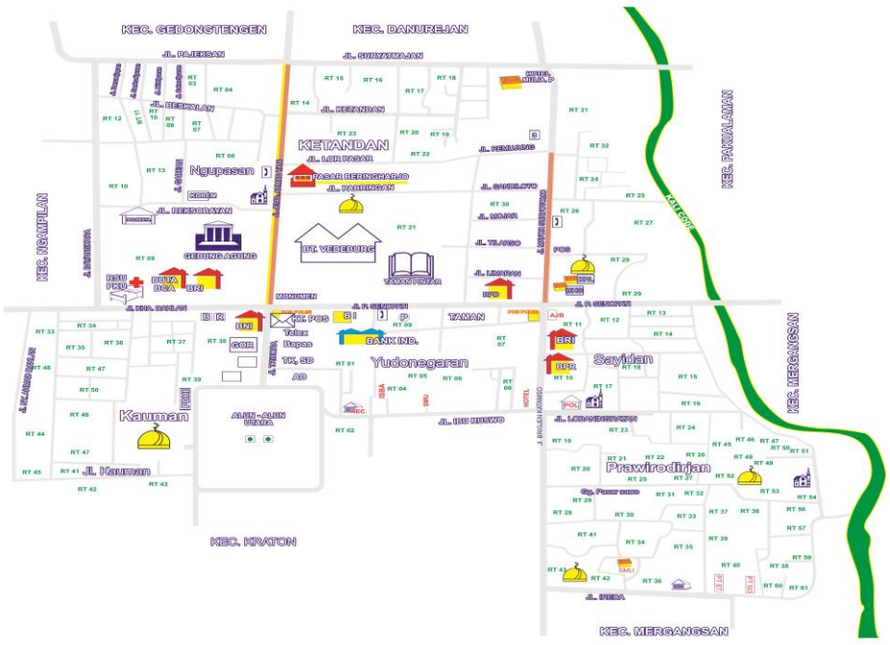

Jumlah penduduk Kecamatan Gondomanan tahun 2019 sebanyak 15.074 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7.340 jiwa dan perempuan sebanyak 7.734 jiwa.

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Gondomanan Tahun 2019

Kelurahan	Luas km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	0,45	9365	20.811
Ngupasan	0,67	5709	8521
Jumlah	1,12	15.074	29.332

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kecamatan Gondomanan dalam Angka Tahun 2019)

Kecamatan Gondomanan juga terbagi menjadi sejumlah kampung, RW dan RT di Kecamatan Gondomanan sebagaimana berikut ini:

Tabel I.2

Jumlah RW dan RT Kecamatan Gondomanan

Kelurahan	Perangkat Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	7	18	61
Ngupasan	8	13	49
Jumlah	15	31	110

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kecamatan Gondomanan dalam Angka Tahun 2019)

Selain lembaga-lembaga tersebut diatas juga terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, diantaranya:

a. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngupasan dan Prawirodirjan.
b. Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan.
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma.
d. Disamping itu juga terdapat lembaga-lembaga seperti : Karang Taruna, Kecamatan Sehat, Kelurahan Siaga, Forum Ko,umikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM), Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (FKUMKM), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TPUKS), Paguyuban Kesenian, Paguyuban Lansia, Paguyuban PAUD, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kampung KB, Kampung Ramah Anak, Kampung Panca Tertib, Kampung Wisata, Gapoktan, Kampung Hijau, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

2. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan adalah kecamatan tipe A dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (1) terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gondomanan sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

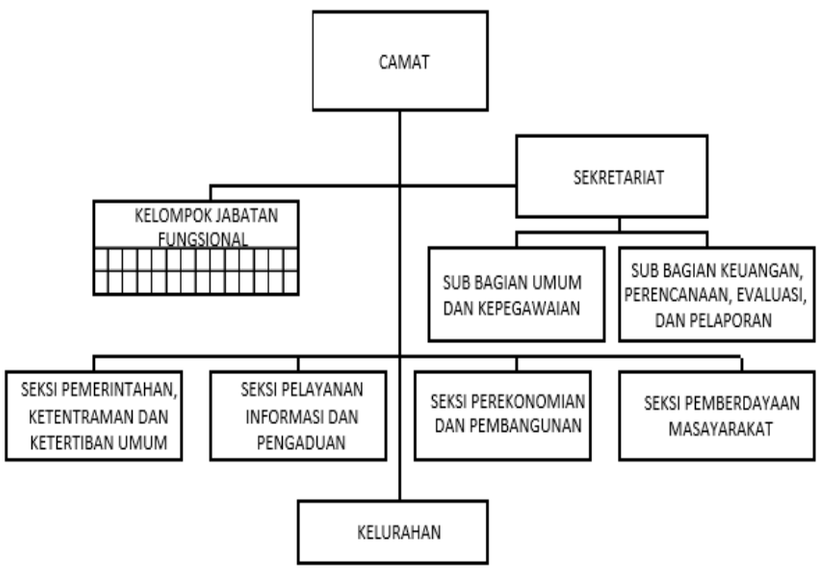

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 3 disebutkan bahwa kecamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan

kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kecamatan di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan

Pemerintahan Daerah. Kedua Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang mengatur sebelumnya.

4. Isu-isu Strategis Organisasi

a. Pelayanan Masyarakat

Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1) Kepentingan umum;
2) Kepastian hukum;
3) Kesamaan hak;
4) Keseimbangan hak dan kewajiban;
5) Profesionalisme;
6) Partisipatif;
7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8) Keterbukaan;
9) Akuntabilitas;
10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) Ketepatan waktu; dan
12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), peran dan fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat makin

diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kecamatan se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung dengan 3 (tiga) program internal dan 1(satu) program eksternal yang mendukung tujuan OPD.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 dan 15 Tahun 2019 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan.

Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kecamatan dan Kelurahan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kecamatan dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kecamatan yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kecamatan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan camat dan lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat

atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksananya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kecamatan Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

5. Keadaan Pegawai

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kecamatan Gondomanan sampai dengan akhir tahun 2019 terdiri atas PNS 20 orang, Naban/PTT 2 orang dan PNS Titipan1 orang Total jumlah pegawai (PNS dan Naban) Kecamatan Gondomanan adalah 23 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 50 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 46% atau tedapat kekurangan 27 orang. Beberapa jabatan struktural kosong karena pejabat pemangku jabatan yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun. Selain itu beberapa jabatan fungsional umum juga belum terisi. Agar kinerja organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan kemudian dipenuhi dengan cara *outsourcing* atau

pengadaan kontrak kerja dengan penyedia jasa orang perseorangan tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perem-puan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kec.	-	1	-	-	-	1	1
3.	Kasi Kecamatan	2	2	-	-	4	-	4
4.	Kasubag	-	2	-	-	2	-	2
5.	Jabfung umum Kec.	2	2	-	2	2	-	4
6.	Naban Kecamatan	1	-	-	-	-	-	1
7.	Lurah	2		-	-	2	-	2
8.	Sekretaris Kel.	-	1	-	-	1	-	1
9.	Kasi Kelurahan	2	2	-	-	4	-	4
10.	Jabfung umum Kel.	-	1	1	-	-	-	1
11.	Naban Kelurahan	1	-	-	-	-	-	1
12.	PNS Titipan	-	1	-	-	-	1	1
	Jumlah	11	12	1	2	15	3	23

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, 2019

Data Diklat Struktural/penjenjangan bagi pejabat struktural:

Tabel I.4
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	9	6	3
3	ADUM	4	2	2
4	Pejabat Struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan	2	1	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, 2019

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	4	1	3
2	S1	10	5	5
3	D III	4	2	2
4	SLTA	4	3	1
5	SLTP	-	-	-
6.	SD	1	-	1
	Jumlah	23	11	12

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, 2019

Jumlah Pegawai Kecamatan Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

Tabel I.6

Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	6	4	2
4	IV B	7	2	5

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gondomanan, 2019

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa dari aspek kualitas, kompetensi yang dimiliki SDM pegawai Kecamatan Gondomanan sudah cukup memadai, meskipun secara kuantitas masih belum mencukupi.

6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan keadaan sarana prasarana berupa barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.7 (Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Gondomanan).

Untuk melaksanakan semua kegiatan berbasis kinerja secara optimal, maka diperlukan dukungan anggaran yang terinci sesuai jenis penggunaannya. Dukungan anggaran bagi Kecamatan Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.8 (Anggaran Kecamatan Gondomanan Tahun 2019).

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Gondomanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.329.112.111,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.620.786.111,- dan belanja langsung sebesar Rp 2.708.326.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 2.708.326.000,- yang didukung oleh 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondomanan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKIP.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2017 - 2022

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta periode 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **"Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan".**

b. Misi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat;
2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
3) Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6) Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman; dan
7) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, Kecamatan Gondomanan selanjutnya menjabarkannya ke

dalam program dan kegiatan yang lebih operasional yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1) Kemiskinan masyarakat menurun;
2) Keberdayaan masyarakat meningkat;
3) Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4) Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6) Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7) Kualias pendidikan meningkat;
8) Harapan hidup masyarakat meningkat;
9) Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10) Infrastruktur wilayah meningkat;
11) Kualitas lingkungan meningkat; dan
12) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu maka Kecamatan Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu "**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan"**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula : ***jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan***.

Pada awal Renstra (2017) nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra (2022) adalah 360.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gondomanan menetapkan sasaran sebagai berikut: **"Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat".** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula: ***Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan : jumlah kelurahan***.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 367. Namun dalam perkembangannya, karena capaian nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan di tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan (dari target 352 tercapai 365,5), maka dilakukan penyesuaian target di tahun 2019 yang semula 354 direvisi menjadi 365,5 (minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya).

Pengukuran kinerja di dalam Rencana Strategik Instansi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi Rencana Strategik Instansi Kecamatan Gondomanan. Agar dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kecamatan Gondomanan terdapat kesatuan arah kebijakan, maka diperlukan adanya landasan berpijak. Untuk mewujudkannya diperlukan serangkaian upaya yang mampu mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi :

1) Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang tinggi.
2) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

3) Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan bebas dari KKN untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat.
4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan.
5) Mengupayakan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
6) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
7) Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan yang prima.
8) Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara procedural dn sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9) Fasilitasi dan motivasi berdasarkan pada tingkat kewenangan dilakukan berdasar pada kemitraan dan kerjasama yang sejajar antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
10) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasar pada target dan penetapannya.

3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan strategis di Kecamatan Gondomanan adalah dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan, program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan strategis Kecamatan Gondomanan tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis di Instansi Kecamatan Gondomanan adalah dengan menetapkan 3 (tiga) program internal dan 1 (satu) program eksternal, meliputi :

Tabel II.1

Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	– Penyelenggaraan Pemerin-tahan Pemerintahan Trantib Kecamatan Gondomanan – Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan – Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan – Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan – Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan – Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan – Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	– Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi – Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor – Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
		Program Peningkatan sarana dan Pra sarana Aparatur	– Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor. – Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	– Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas perlu adanya dukungan untuk membangun semangat mencapai tujuan dengan motto ***"SATU HATI UNTUK MELAYANI"***, mengandung maksud bahwa dalam setiap langkah melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi instansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan aturan namun juga dilandasi dengan hati ikhlas sebagai sebuah ibadah. Dengan berpegang pada motto ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya fokus pada target semata namun juga didasari dengan keikhlasan dan berlandaskan pada delapan asas nilai, yakni : Sederhana, Adanya kepastian/kejelasan, Keamanan, Transparansi, Efisien, Ekonomis, Keadilan dan Ketepatan Waktu.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja merupakan hasil dari proses penetapan perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.Secara ringkas perencanaan kinerja Kecamatan Gondomanan pada tahun 2019 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut:

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	365,5	Program Pening-katan Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat Berba-sis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1.957.503.000

Melalui mekanisme perubahan anggaran APBD 2019 maka perjanjian kinerja mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel II.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	365,5	Program Pening-katan Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat Berba-sis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1.957.503.000

C. Rencana AnggaranTahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Gondomanan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran murni sebesar Rp4.237.305.196,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.568.264.851,- dan Belanja Langsung Rp 2.664.040.345,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 4.329.112.111,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.620.786.111,- dan Belanja Langsung Rp2.708.326.000,-.

1. Target Belanja Kecamatan Gondomanan

Target Belanja Kecamatan Gondomanan Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

Target Belanja Kecamatan Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.620.786.111,-	37,44 %
Belanja Langsung	Rp. 2.708.326.000,-	62,56 %
Jumlah	Rp. 4.329.112.111,-	100%

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Gondomanan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi/ Prosentase	Kete-rangan
1	2	3	4	5
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	1.957.503.000	1.920.540.552 (98,11 %)	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju Good Governance dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah kecamatan Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kecamatan Gondomanan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Gondomaanan

Misi 1:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkat-kan perkem-bangan pem-bangunan Kecamatan Gondoma-nan	Tingkat per kembangan pembangu-nan Keca-matan Gon-domanan meningkat	Nilai evaluasi perkemba ngan pem bangunan Kecamat-an Gon-domanan	350	352	365, 5	366	366, 5	367	Tingkat Perkem-bangan Pemba-ngunan Kelurah an

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	91≥	Sangat Tinggi
2.	76≤ 90	Tinggi
3.	66≤ 75	Sedang
4.	51≤ 65	Rendah
5.	≤50	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarikapabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus ***: (realisasi capaian kinerja : target)x100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlahkegiatan)***.

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Gondomanan pada Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	365,5	366	100,14%

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kecamatan Gondomanan adalah **100,14%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Selanjutnya capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persen-tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelan-caran administrasi, keuangan dan ope-rasional perkantoran	100%	96,53%	96,53%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	92,58%	92,58%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,4	88,18	99,12%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	12	25	206%

Rumus penghitungan nilai indikator untuk program eksternal yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan adalah sebagai berikut:

a. Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah : ***Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.***

b. Tingkat Swadaya Masyarakat dihitung dari prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana PMK. Formulanya adalah : **(*Jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Gondomanan : jumlah LPMK Kecamatan Gondomanan yang mendapatkan dana PMK)x 100%.***
Data penunjang tingkat swadaya masyarakat sebagaimana yang dilaporkan dari LPMK se Kecamatan Gondomanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5

Data Prosentase Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Tahun 2019

NO	LPMK	Jumlah dana PMK (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Prosentase dana swadaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LPMK Ngupasan	106.515.000	20.802.900	20%
2.	LPMK Prawirodirjan	132.530.000	39.010.000	29,43%
	Jumlah rata-rata prosentase dana swadaya terhadap dana PMK			25%

Berdasarkan capaian kinerja program pada tabel di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 88,18% dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Baik** yaitu **101,3%.** Sedangkan untuk indikator swadaya masyarakat capaian kinerjanya 25% dengan nilai peringkat **Sangat Baik** yaitu **206%**.

Jika diringkas secara garis besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaiankinerja program Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.6

Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Prosentase realisasi (%)
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,53
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,68
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	98,11
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan Trantib Kecamatan Gondomanan	98,35
	2) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	99,55
	3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	99,99
	4) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	96,47
	5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Parwirodirjan	97,64
	6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	99,21

Program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomananmencapai realisasi 98,11% atau masuk kategori capaian Sangat Tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.7

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	365,5	366	104%	100,1%

Prosentase capaian kinerja pada tahun 2019 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2018 karena pada triwulan pertama tahun 2019 dilakukan penyesuaian target kinerja dari 354 menjadi 365,5. Tahun 2018 realisasinya mencapai 104% dari target kinerja, karena ada peningkatan yang cukup signifikan di dalam dinamika kegiatan, prestasi, inovasi dan partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Gondomanan. Hal ini perlu dicatat karena berdampak pada penyesuaian target kinerja di tahun berikutnya (2020) sampai dengan akhir periode RPJMD (2022). Tahun 2019 realisasinya tercapai 100,1% yang artinya masih pada kategori Sangat Tinggi namun tidak sebesar pada periode sebelumnya sebagai dampak penyesuaian target tersebut.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat diukur dengan 3 (tiga) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan, tingkat swadaya masyarakat, dan nilai survei kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan	Jumlah nilai tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan :2
		Tingkat swadaya masyarakat	(Jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Gondomanan : jumlah LPMK Kecamatan Gondomanan yang men-dapatkan dana PMK) x100%.
		Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25

Pada tataran program dan kegiatan dapat pula dilihat perbandingan capaian target kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III.9
Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
dengan Tahun-tahun Sebelumnya.

No	Program	Indikator	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Prosentase 2017	Prosentase 2018	Prosentase 2019
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	95,05%	95,67%	96,53%	95,05%	95,05%	96,53 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	97,72%	95,20%	92,68%	97,72%	97,72%	92,68 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	97,12%	99,86	100%	97,12%	97,12%	100%

4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pember-dayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondoma-nan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87	87	87,04	87,63%	87,51	88,18	107%	101%	103%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	30,95%	10%	11%	11%	10%	24%	110%	110%	225%

Program dan indikator kinerja pada RPJMD tahun 2017-2022 juga berbeda dengan RPJMD sebelumnya sehingga penyajian data yang ada hanya merupakan perbandingan dan pengayaan data karena datanya memang tersedia. Hanya saja untuk Indikator tingkat swadaya masyarakat memang masih sama dengan RPJMD periode sebelumnya.

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja program Kecamatan Gondomanan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel III.10

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun lalu

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,05	95,67	96,53
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	97,72	95,20	92,58
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,12	99,86	100
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	93,57	97,18	98,11

Grafik Tabel III.10

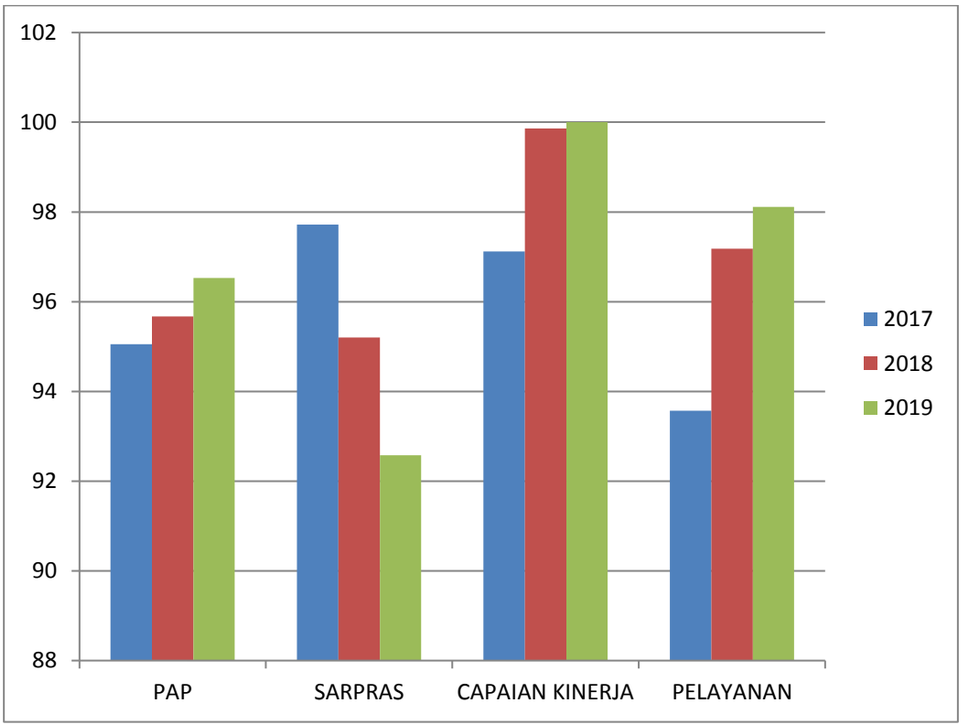

b. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel III.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2019	Reali-sasi Tahun 2019	Target Akhir Ren-stra	Capaian s/d 2019 trhadap target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	365,5	366	367	99,59%

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2019	Reali-sasi 2019	Target dalam Renstra tahun ke 3	Tar-get Akhir Ren-stra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target Renstra tahun 3	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasi-onal per-kantoran	100%	96,53 %	100%	100 %	96,53%	96,53%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	92,58 %	100%	100 %	92,58%	92,58%
3.	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pember-dayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondoma-nan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,04	88,11	87,04	88	101%	101%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	12%	24,72 %	11%	15%	206%	206%

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada semua program di Kecamatan Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi, bahkan pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat capaiannya melampaui target yang telah

ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kecamatan Gondomanan tersebut. Meskipun demikian masih ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Gondomanan tahun 2019 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini.indikator kinerja berupa “Meningkatkan Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan” pada tahun 2019 ditargetkan 365,5 sedangkan dilihat dari nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kecamatan Gondomanan tahun 2019 adalah 366 atau tercapai100,1% dengan kategori capaian Sangat Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor internal

(a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kecamatan Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses

motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kecamatan Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kecamatan Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

(d) Inovasi dalam Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi.

Inovasi dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan di Kecamatan Gondomanan tahun 2019 terwujud dalam bentuk Paket Komanan yang dilaunching pada bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari segenap warga masyarakat dan pihak-pihak terkait.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi tak dipungkiri sangat membatu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kecamatan Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas.

2) Faktor Eksternal

(a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kecamatan) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

(b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang tidak produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

(c) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimca

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimca) yang ada

di kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala KUA dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

Contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain dalam pemberian kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun yang baru mengurus KTP, diberikan bingkisan salahsatunya berupa buletin yang materinya berasal dari masing-masing *stakeholder* Forkompimca, yang dimaksudkan guna memberikan bekal informasi yang lebih lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun.

Contoh lainnya adalah keterlibatan UPT Puskesmas dan KUA dalam beberapa proses administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan, kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti olahraga bersama tiap Jumat, kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa, HUT Kota Jogja, malam tirakatan, upacara 17 Agustus, dan sebagainya.

4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 95,58% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,11%%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,68%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat (98,11%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran pendukung (96,68%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.13

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkem-bangan pemba-ngunan Kecamatan Gon-domanan mening-kat	Tingkat per-kembangan pmbangunan Kecamatan Gondoma-nan	365,5	366	100,1	2.708.326.000	2.638.950.042	97,43
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,4	88,11	101			
		Tingkat Swadaya Masyara-kat	12%	25%	206			
Jumlah						2.708.326.000	2.638.950.042	97,43
Total Belanja Langsung						2.708.326.000	2.638.950.042	97,43

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi. Data efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Gondomanantahun 2019 dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel III.14

Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
SKPD Kecamatan Gondomanan Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Langsung	2.708.326.000	2.638.950.042	2,56%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	581.134.000	560.951.594	3,47%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	164.863.000	152.631.896	7,42%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.426.000	8.426.000	0,00%
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1.957.503.000	1.920.540.552	1,89%
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Trantib KecamatanGondomanan	169.571.000	166.767.000	1,65%
	b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	74.104.000	73.769.452	0,45%
	c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	270.565.000	270.557.500	0,003%
	d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Ngupasan	513.495.000	495.382.600	3,53%
	e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Prawirodirjan	531.004.000	518.467.000	2,36%
	f. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	398.764.000	395.597.000	0,79%
B.	Belanja Tidak Langsung	1.620.786.111	1.499.099.327	7,51%

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan karena sesuatu sebab baik eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan punya penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, karena nilainya cukup kecil maka inefisiensi ini tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi tanpa harus meninmbulkan biaya yang besar.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan

batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain.

b. Pada sebagian kecil kegiatan pendukung pencapaian sasaran, efisiensi terdapat pada sub-sub anggaran yang tidak direalisasikan namun tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada program peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan memang masuk kategori Sangat Tinggi. Namun demikian oleh karena kecilnya deviasi anggaran kegiatan yang tidak direalisasikan atau kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya maka hal itu tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

b) Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

c) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website,*

facebook, instagram, youtube dan bulettin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Gondomanan.

d) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan kecamatan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan.

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilaksanakan di kecamatan maupun kelurahan melibatkan masyarakat diawali dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.

b) Partisipasi dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sangat mendukung kelancaran kegiatan.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Potensi SDM pegawai Kecamatan Gondomanan yang ada saat ini baru terpenuhi sekitar 46% kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan. Secara logika tentu ini sangat tidak memadai bagi organisasi Kecamatan Gondomanan untuk menanggung beban tugas yang semakin berat dengan adanya pelimpahan kewenangan maupun alokasi dana kelurahan serta perubahan dalam mekanisme belanja langsung. Beberapa jabatan yang kosong sudah diisi melalui mekanisme belanja jasa orang perseorangan (tenaga teknis, tenaga bantuan, dan outsourcing). Selain itu, dari segi kualitas juga sudah dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM pun masih dirasa kurang memadai.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Pelayanan Administrasi Perkantoran khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena

jarak rumah ke kantor dekat, dan sebagainya). Termasuk dalam hal ini belanja listrik dan telepon yang kadang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang disediakan.Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah bahwa penyerapan anggaran tidak bisa maksimal atau tepat mencapai 100% target keuangan (ada sisa anggaran), meskipun pada capaian target fisik bisa tercapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Kecamatan GondomananKota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.15
Realisasi Anggaran Kecamatan Gondomanan
Tahun Anggaran 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosen-tase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Langsung	2.708.326.000	2.638.950.042	97,44%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	581.134.000	560.951.594	96,53%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.863.000	152.631.896	92,58%
3.	Program Peningkatan Pengemba-ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.426.000	8.426.000	100,00%
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	1.957.503.000	1.920.540.552	98,11%
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Trantib Kecamatan Gondomanan	169.571.000	166.767.000	98,35%
	b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan	74.104.000	73.769.452	99,55%
	c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	270.565.000	270.557.500	99,997%
	d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Ngupasan	513.495.000	495.382.600	96,47%
	e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Prawirodirjan	531.004.000	518.467.000	97,64%
	f. Penyelenggaraan Pembangu-nan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	398.764.000	395.597.000	99,21%
B	Belanja Tidak Langsung	1.620.786.111	1.499.099.327	92,49%
	Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	4.329.112.111	4.138.049.369	94,97%

Grafik Tabel III.15
Realisasi Anggaran Kecamatan Gondomanan
Tahun Anggaran 2019

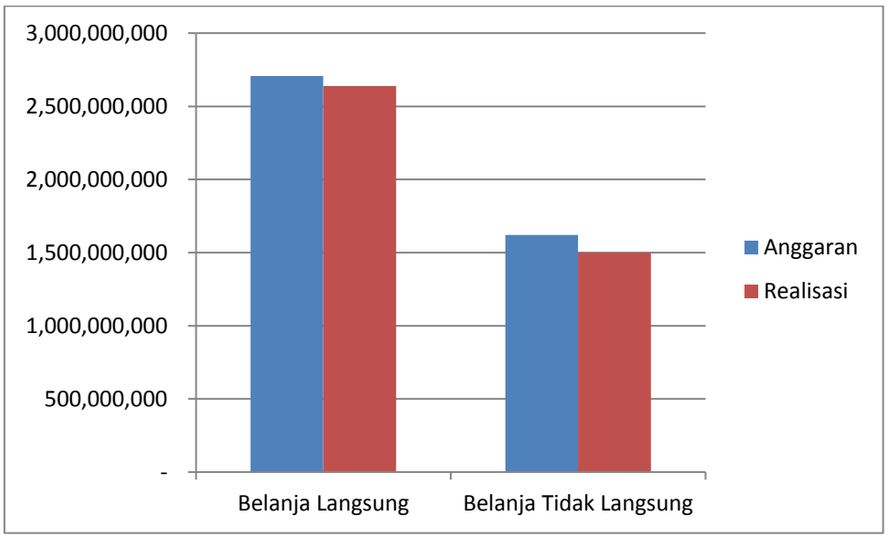

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung 97,44%belanja tidak langsung 92,49% jika dinilai rata-rata menjadi 94,97%. Secara umum pula dapat dikatakan bahwa nilai capaian realisasi kinerja Kecamatan Gondomanan tahun 2019 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

C. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019 ini, Kecamatan Gondomanan telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Inovasi Paket Pelayanan Komanan

Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

2. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis.

Lampiran

Tabel. III.5
LAPORAN SKM TAHUN 2019 SEMESTER I

UNIT PELAYANAN : Kec Gondomanan
ALAMAT : Jl Ibu Ruswo 3A
TELEPON/FAX : (0274) 376783

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan	**3,547**
2	Sistem,Mekanisme, dan Prosedur	**3,567**
3	Waktu Penyelesaian	**3,480**
4	Biaya/Tarif	**3,580**
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	**3,593**
6	Kompetensi Pelaksana	**3,633**
7	Perilaku Pelaksana	**3,620**
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	**3,467**
9	Sarana dan Prasarana	**3,580**
	NILAI RATA-RATA	**3,563**
	NILAI SKM Setelah dikonversi	**88,18**

SKM Unit Pelayanan	**88,18**
Mutu Pelayanan	**A**
Kinerja Unit Pelayanan	**SANGAT BAIK**

BAB IV
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam Tahun 2019seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Gondomanan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukan pencapaian target yang sangat baik.Hal itu menunjukan segala upaya yang dilakukan Kecamatan Gondomanansecara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Gondomanan yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders*se-Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, dan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kecamatan Gondomanan. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondomanan pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kecamatan Gondomanan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untuk antisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kecamatan Gondomanan Tahun Anggaran 2019 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2019 (mohon di print dari sim e-lakip)

Lampiran 6 . Rencana Aksi (print dari e-lakip)

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima